

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arisaputra, M. I. (2015). *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi, A. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- H.S., S. (2014). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haryono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. M. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Nurlinda, I. (2009). *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Poerwadarminta, W. J. (2008). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rudi M. Simamora, (2000). *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jambatan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Yuliandri. (2010). *Azas-Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### B. Artikel Jurnal

- Achmad, Z. (2010). *Peluang dan Tantangan Investasi Hulu Migas di Indonesia*. Jakarta: Seminar Investasi Hulu Migas.
- Djamal, J. (Jusri Djamal). *Aspek-Aspek Hukum Masalah Penanaman Modal*. Jakarta: BKPM.

- Goeffrey Picton Turbervill. (2009). *"Oil and Gas: a practical handbook"*,  
*Globe Business Publishing*. United Kingdom.
- Ida Bagus Rachmadi Supancana. (2006). *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, T. M., & Buxbaum, R. M. (1986). *Peranan Hukum dalam Perekonomian DI Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fak Hukum UII.
- Pertamina. (2019). *Hukum Perkembangan Industri Perminyakan di Indonesia*.  
Jakarta.
- Pudyantoro, A. R. (2014). *Proyek Hulu Migas: Evaluasi Dan Analisis Petro Ekonomi*. Petromindo.
- Rakhmawati, R. (2003). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia.
- Sumantoro. (1977). *Aspek-Aspek Pengembangan Dunia Usaha Indonesia*.  
Bandung: Bina Cipta.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **C. Tugas Akhir/ Penelitian**

- Amelia, R. (2009). *Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas: Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (Kakap) Ltd*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- B.S., Y. A. (2009). *"Efektifitas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagai Bentuk. Yogyakarta Kerjasama Penanaman Modal yang Dilakukan BP Migas Terkait dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal"*:  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Chastity, D. M. (1997). *Masalah dan Implikasi Hukum dalam Praktek Pelaksanaan Ketentuan Kontrak Bagi Hasil dalam Bidang Perminyakan di Indonesia*. Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dipodiputro, M. B. (2013). *Position of the Indonesian Government to Use its Sovereignty Over Its Natural Resources in Renegotiation Terms Under Profit Sharing Contract*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- H.S.Silaban, J. (2018). *Kajian Hukum Bisnis Terhadap Aktualisasi Sistem Gross Split dalam Skema Production Sharing Contract Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Hasan, A. M. (2010). *Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*. Depok:

Robby, J. (2012). *Analisis Kebijakan Batasan Cost Recovery Terhadap Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat dalam Menentukan Perhitungan Bagi Hasil dan Pajak Penghasilan Kontraktor Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi*. Depok: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

#### **D. Publikasi Elektronik / Internet**

Ahli, P. (n.d.). *Pengertian, Jenis, Fungsi Badan Usaha*. Retrieved from <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-jenis-fungsi-badan-usaha.html>

Ana. (t.thn.). *Pengertian Fungsi Dan Peran*. Diambil kembali dari <http://ana-dgmcs.blogspot.co.id/2011/04/tugas-pengertian-fungsi-peran-dan.html>,

*Hukum Online*. (2020). Diambil kembali dari MK: BP Migas Inkonstitusional: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--bp-migas-inkonstitusional-lt50a2367d37e5c/>

*Hukum Online*. (2021). <https://www.hukumonline.com/berita/a/compang-camping-uu-migas-lt54ec68c7d2cac/>

*Indonesian Piping Knowledge*. (t.thn.). Dipetik September 2019, 2019, dari “Pengertian Upstream Downstream dalam Oil and Gas”: <http://www.idpipe.com/2014/09/pengertian-upstream-downstream-dalam-oil-and-gas.html>

*Pertamina. E.P.* (n.d.). Retrieved Oktober 10, 2019, from <http://www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami>

*Sparkling Rengga*. (t.thn.). Diambil kembali dari Menyingkap Tabir Sejarah Pertambangan di Indonesia: [http://Sparkling\\_Rengga/Menyingkap\\_Tabir\\_Sejarah\\_Pertambangan\\_di\\_Indonesia.html](http://Sparkling_Rengga/Menyingkap_Tabir_Sejarah_Pertambangan_di_Indonesia.html)

*Wikipedia Bahasa Indonesia*. (t.thn.). Diambil kembali dari Lembaga Nonstruktural: [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_nonstruktural](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_nonstruktural)

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*.

Indonesia. (1971). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*.

Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi*.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi*

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Kontrak Kerjasama dan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi.*

Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Cost Recovery.*

Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Kegiatan Hulu Minyak dan gas Bumi.*

Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Bagi Hasil Gross Split.*

Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Gross Split.*

Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.*

